

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 137)

Oleh

FILLAH AKRAM RAMADHANSYAH

Pasal ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkoba yang harta bendanya merupakan harta hasil tindak pidana untuk dirampas oleh negara atas nama negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menghilangkan pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana dan Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang hukum acara pidana sistem peradilan pidana Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan hukum dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka dan menganalisisnya menggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada hakikatnya memuat kewajiban penuntut umum untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, yang akan memberikan dasar yang cukup bagi hakim mengenai kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur mengenai pemusnahan barang bukti penyitaan aset dalam kasus pencucian uang. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang dituduhkan kepadanya di persidangan. Keterangan terdakwa tidak cukup menjadi dasar pembuktian bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, yaitu Kementerian Kehakiman. tidak mengakui proses pembuktian terhadap terdakwa. Konsep pembuktian kebalikan dari tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian kasus narkoba dimana harta benda adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dalam perspektif KUHAP, khusus sidang pertama adalah sidang permohonan pelepasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang tata cara pengurusan permohonan pembuangan uang hasil kegiatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Konsep pertentangan pembuktian yang kedua terhadap tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian perkara narkoba yang harta bendanya adalah uang hasil dilakukannya tindak pidana dilihat dari sudut hukum acara pidana didasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait untuk Pencegahan dan penghapusan kegiatan pencucian uang. tindak pidana dan Pasal 98 UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 digabung dengan PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerapan UU Narkoba pada Pasal 44 tentang Pengelolaan Hasil Tindak Pidana Narkoba.

Kata Kunci: *Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana Pencucian uang (UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika (UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.*

ABSTRACT
**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE BURDEN OF PROOF BY THE
PUBLIC PROSECUTOR IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS
(Study of Implementation of Article 137)**

By
FILLAH AKRAM RAMADHANSYAH

This article aims to examine the implementation of reverse proof of money laundering crimes in drug cases where the assets are assets resulting from criminal acts to be confiscated by the state in the name of the state in accordance with the provisions of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes. eliminate money laundering. Crime and Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning criminal procedural law in the Indonesian criminal justice system. This article is normative legal research that is descriptive in nature and the form of research used is perspective. Legal approach with secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal documents. Data collection techniques are carried out by studying documents or library materials and analyzing them using deductive reasoning methods. Evidence at trial essentially contains the obligation of the public prosecutor to convince the judge of the defendant's guilt, which will provide a sufficient basis for the judge regarding the truth of the facts stated in the indictment. This is in accordance with Article 66 of the Criminal Procedure Code which regulates the destruction of evidence of asset confiscation in money laundering cases. The defendant has no obligation to prove what he is accused of at trial. The defendant's statement is not sufficient to be the basis for proving that the defendant is guilty of the act charged, but must be accompanied by other evidence, namely the Ministry of Justice. does not recognize the evidentiary process against the defendant. The concept of reverse proof of the crime of money laundering in resolving drug cases where property is property obtained from criminal acts in the perspective of the Criminal Procedure Code, specifically the first trial is the trial of the application for the release of assets in the crime of money laundering carried out by investigators. based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 01 of 2013 concerning procedures for processing requests for the disposal of money resulting from money laundering activities or other criminal acts. The second concept of conflict of evidence regarding the crime of money laundering in resolving drug cases where the property is money resulting from the commission of a criminal act, seen from the perspective of criminal procedural law, is based on Article 77 of Law Number 8 of 2010 relating to the prevention and elimination of money laundering activities. criminal offenses and Article 98 of the Narcotics Law Number 35 of 2009 were combined with PP Number 40 of 2013 concerning the Implementation of the Drugs Law in Article 44 concerning Management of the Proceeds of Drug Crimes.

Keywords : *Reverse evidence, Criminal Procedure Law, Money laundering crime (Law No. 8 of 2010), Narcotics Crimes (UU No. 35 of 2009), Confiscation of Assets Proceeding from Crimes.*